**PENGARUH PANDEMI TERHADAP
PEMBAYARAN PAJAK PELAKU UMKM**

Oleh:

EKA TITIS RAHMAWATI (1960302100061)

MUHAMMAD FATIHUL HUDA (1960302100073)

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pembayaran pajak pelaku UMKM. Wabah Corona merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan isu yang terbaru, dan ditujukan kepada seluruh wajib pajak perorangan dan UMKM daerah Trenggalek. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi pada objek UMKM dan studi literatur kepustakaan. Hasil membuktikan bahwa melalui pemanfaatan teknologi para pemula UMKM tidak terbebani secara finansial dan tetap menjalani kewajiban sebagai Wajib Pajak terutama dimasa Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui Berdasarkan hasil analisis pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak dimasa pandemi COVID-19. Persepsi wajib pajak dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi terciptanya kelancaran kebijakan baru ini ditengah-tengah pandemi,

karena wajib pajak yang memiliki persepsi positif maka hal tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang insentif pajak akan dapat mendorong perbuatan wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan, dan hal ini akan dapat membantu pemerintah dalam kelancaran program insentif pajak UMKM dimasa pandemi karena program insentif ini diberikan pemerintah guna menstabilkan perekonomian ditengah-tengah pandemi COVID-19.

Kata kunci : Pandemi Covid-19, pajak UMKM, insentif pajak

PENDAHULUAN

Pada pertengahan Maret 2020 dunia mengalami kejadian luar biasa yakni munculnya virus corona yang sangat berbahaya, merebaknya virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan namun berdampak pada perekonomian di negara termasuk di Indonesia. Pandemi virus corona atau Covid-19 juga memberikan dampak yang besar terhadap sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan focus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Pasar Tradisional dan Pandemi Covid-19 Pasar tradisional saat ini masih menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi penting bagi sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai kendala dan perubahan yang terjadi telah meminggirkan pasar tradisional yang telah lama memiliki fungsi redistribusi produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat termasuk buah dan sayuran. Resiko dalam distribusi

produk pertanian diakibatkan oleh adanya ketergantungan aktivitas pertanian pada alam, pengaruh buruk alam telah banyak mempengaruhi total hasil panen pertanian. Selain karena faktor alam (cuaca), faktor harga jual juga menjadi resiko yang sangat mempengaruhi pendapatan pedagang yang pada akhirnya akan mempengaruhi keuntungan yang diterima.

Keberanian para pedagang untuk menerima resiko sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha yang dilakukannya. Ditengah wabah pandemi Covid19 yang sedang terjadi di Indonesia, banyak dampak yang terjadi bagi perekonomian masyarakat Indonesia, terutama pedagang di pasar tradisional. Semenjak beberapa daerah memberlakukan pembatasan pergerakan orang, kerumunan sampai ada yang melakukan karantina parsial sehingga banyak pedagang yang merugi karena pembeli sangat jarang bahkan tak ada. Beberapa pedagang masih mencari peruntungan berjualan meski dengan resiko ditertibkan. Hal itu, karena kehidupan mereka sangat bergantung kepada pendapatan harian. Dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat Trenggalek sangat besar, dari beberapa masyarakat yang kesulitan bahkan kehilangan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami penurunan dari 5,4% menjadi 2,5%, dan bahkan bisa menjadi minus 0,4%.

Krisis akibat Covid-19 saat ini terjadi secara simultan, sehingga akibatnya sangat dirasakan oleh kelompok rentan yang semakin terpuruk, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani dan masyarakat miskin(Sinaga & Purba, 2020). Siklus aktivitas ekonomi masyarakat sangat menurun secara drastis, maka pemerintah harus mengambil kebijakan strategis yang akseleratif dalam menangani kesulitan ekonomi yang menimpa masyarakat(Sinaga & Purba, 2020).

Eksternalitas ekonomi dari Covid19 yang paling nyata terlihat saat ini adalah fenomena banyaknya karyawan yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan berbagai perusahaan yang mulai bangkrut. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2020, total pekerja yang dirumahkan dan kena PHK selama masa pandemi ini telah mencapai 1.943.916

orang dari 114.340 perusahaan. Situasi tersebut secara otomatis berdampak pada aspek-aspek lain, terutama kepada pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha rumah makan, dan usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada keramaian massa.

Tercipta 5,2 juta pengangguran baru dengan akumulasi para buruh yang terdampak PHK beserta beberapa usaha-usaha kecil masyarakat yang bangkrut (gulung tikar). Situasi ini secara otomatis pula mempengaruhi daya beli masyarakat yang menurun secara signifikan, dimana perputaran uang di tengah masyarakat menjadi sangat minim, pada saat yang sama produksi barang pun sangat terbatas, sehingga terjadi defisit perdagangan dalam siklus perekonomian (Sinaga & Purba, 2020). Poin utama dalam kebijakan distribusi ini pertama ini adalah diberikan bantuan tunai dan bantuan bahan pokok, sambil melaksanakan program kemitraan dengan berbagai unsur usaha mikro dan makro masyarakat, yaitu diberikannya insentif pada UKKM, usaha-usaha rumahan masyarakat dan pedagang- pedagang kecil. Pemberian bantuan tersebut saat ini adalah langkah yang paling konkrit untuk menguatkan relasi antara pemerintah dengan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini.

Orientasi terhadap fleksibilitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini bisa dilakukan manakala pemerintah secara sistematis dan konsisten melaksanakan tiga konsep kebijakan strategis yaitu kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi. Tiga kebijakan tersebut harus ditopang dengan formulasi dan strategi kongkrit yang sesuai dengan kondisi empirisnya. Kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi nasional adalah survival di tingkat individu dan entitas usaha. Oleh karena itu negara harus mengerahkan segenap upaya, termasuk dengan memberikan stimulus, agar rakyatnya tidak collaps semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan. (Sinaga & Purba, 2020).

Usaha skala besar terdampak dapat melakukan penghentian sementara operasi saat Covid-19 melanda dan kemudian mampu beroperasi kembali saat keadaan telah normal karena memiliki kapasitas permodalan dan akses pembiayaan yang memadai. Sebaliknya, banyak Usaha skala kecil dan mikro

(UKM) yang lebih rentan tidak mampu bangkit kembali beroperasi saat keadaan telah normal karena modalnya terkikis untuk menutupi biaya hidup keluarga (aliran pendapatannya macet selama usaha berhenti beroperasi).

Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk memperkuat berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan (Listiyowati, Iin Indarti, Freddy Aldo Setiawan, 2020). Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini harus semakin ditingkatkan, mengingat semakin tingginya tuntutan kebutuhan dan semakin kompleksnya tantangan zaman modern (Listiyowati, Iin Indarti, Freddy Aldo Setiawan, 2020).

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini telah memunculkan masalah yang harus dihadapi oleh UMKM, diantaranya penurunan permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan masih rendahnya SDM. Sehingga hal ini berdampak terhadap turunnya tingkat penjualan bahkan banyak UMKM yang gulung tikar. Ketika hal ini terjadi, maka secara langsung akan membuat UMKM akan menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan. Salah satunya adalah beban pajak. Sehingga hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan stimulus untuk mendongkrak UMKM untuk tetap going concern melalui penurunan nilai tarif pajak UMKM. Sehingga tingkat kepatuhan UMKM untuk membayar pajak tetap terjaga.

Dengan adanya hal tersebut pemerintah melalui (Keuangan & Indonesia, 2020) Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus pada tanggal 27 April 2020. Namun fenomena yang terjadi, wajib pajak khususnya pemilik UMKM masih ada beberapa yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal, namun dalam penerapan insentif pajak ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memanfaatkan insentif pajak dimasa pandemi COVID-19.

Pelaku UMKM harus dapat beranggapan bahwa insentif ini merupakan sebuah sumbangan dari pemerintah demi menstabilkan perekonomian atas dampak pandemi. Maka dari itu, dengan adanya penafsiran informasi yang baik dari wajib pajak dapat terciptanya kepatuhan wajib pajak atas menerimanya insentif pajak UMKM 0% ditanggung pemerintah hingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga jadi salah satu yang merasakan dampak corona terhadap perekonomian. Mereka mengaku kehilangan pelanggan, yang diakibatkan adanya anjuran physical distancing dan di rumah saja. Hal ini menyebabkan penjualan menurun karena tidak ada masyarakat yang ke luar rumah untuk berbelanja. UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan perusahaan besar. Namun, keberadaan usaha ini banyak dijumpai di sepanjang sudut wilayah sehingga mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor ini dapat memaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu Negara. Usaha kecil dan menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh usaha kecil dan menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja, (Listiyowati, Iin Indarti, Freddy Aldo Setiawan, 2020).

Masalah kepatuhan pajak yang masih rendah merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, sehingga berimplikasi pada rendah ratio penerimaan pajak. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakkan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau gabungan dari semua segi tersebut.

Kepatuhan terhadap berbagai kewajiban perpajakan menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM tidak mengetahui kalau mereka sebenarnya sudah termasuk dalam kriteria pengusaha tertentu dengan omzet di bawah Rp 4,8 milyar per tahun atau bahkan ada yang di atas Rp 4,8 milyar per tahun.

Dengan kondisi ini berarti, perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan pada UMKM agar pelaku UMKM memahami seluk beluk perpajakan sehingga mereka dapat melihat kemudahan dan berbagai fasilitas perpajakan yang mendukung kegiatan usaha mereka. Perlu kerjasama antara pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan banyak pihak, agar kegiatan sosialisasi kepada para pelaku UMKM ini dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat banyak sekali jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Perguruan tinggi juga banyak melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait perpajakan. (Listiyowati, Iin Indarti, Freddy Aldo Setiawan, 2020)

Apalagi dalam suasana saat ini, di tahun 2020, dalam kondisi Pandemi Covid-19, di mana hampir seluruh sektor usaha lumpuh. Banyak orang membatasi kegiatan, menghindari keluar rumah. Secara psikologis banyak orang menjadi paranoid dengan semua hal yang berasal dari luar rumahnya. Jika sebelum Pandemi Covid-19, orang dengan santai berbelanja keperluan sehari-hari, namun saat ini, semua pihak akan berhati-hati. Tidak saja mengurangi bepergian ke pasar tradisional, bahkan juga ke pusat-pusat perbelanjaan (mall). Kegiatan pembelian makanan jadi dari warung dan atau restoran juga menurun. Akibatnya, penjualan di pasar tradisional merosot dan warung makan menyusut penjualannya karena penurunan jumlah pelanggan.

Banyak pelaku UMKM yang sudah gulung tikar karena efek domino dari Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, masih banyak pula UMKM yang tetap mampu bertahan. Bahkan sebagian UMKM yang jenis usahanya berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19, justru mengalami lonjakan permintaan. UMKM memerlukan pendampingan yang berkelanjutan agar dapat bertahan dan berkembang. Pendampingan terhadap UMKM yang menjadi tugas Kementerian Koperasi dan UKM juga banyak dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta perguruan tinggi.

Banyak hal yang diberikan dalam pendampingan tersebut mulai dari bagaimana memasarkan produk, mendapatkan kredit, mengelola konsumen, mengemas produk supaya menarik, membuat materi iklan, akuntansi, dan perpajakan. Banyak UMKM yang terdampak, mulai dari penurunan omzet penjualan hingga tutup usaha. Namun ada juga UMKM yang justru berkembang di tengah pandemi ini. Menghadapi kondisi ini, pemerintah berusaha memberikan bantuan kepada para UMKM baik bantuan uang tunai dan juga insentif dalam bentuk keringanan pajak. Salah satu kebijakan yang diberikan adalah insentif pajak untuk tidak membayar PPh Final 0,5% bagi UMKM yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 milyar per tahun dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara. Membayar pajak oleh warga negara merupakan kewajiban dan penerimaan dari pajak ini sangat penting bagi pemerintah dalam rangka membelanjai kegiatan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik. Seiring dengan itu, peranan pajak dalam hal pendanaan juga akan semakin besar. Oleh sebab itu diperlukan usaha untuk meningkatkan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Banyak media

dalam negeri mengabarkan tentang bagaimana tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak. Juga terdapat beberapa studi atau penelitian yang berkaitan dengan seputar hal tersebut. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak merupakan hal yang mendasar sekali. Merupakan suatu wujud sikap yang seiring sejalan dan merupakan satu kesatuan momentum yang harus dapat ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai targetnya (Rachmad Gesah Mukti Prabowo, SE. Ak, 2014)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

(Listiyowati, Iin Indarti, Freddy Aldo Setiawan, 2020) mengemukakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu Negara. Usaha kecil dan menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh usaha kecil dan menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah UU No. 20/2008. UMKM juga mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. UMKM merupakan “perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Insentif Pajak

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Menurut (Dewi & Nataherwin, 2020), pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu.

Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah.

Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal ini perlu diperhatikan adalah sampai seberapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai seberapa lama investasi yang dapat memberikan hasil. Contohnya adalah tax holiday atau tax exemption. Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. (Dewi & Nataherwin, 2020)

Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini, dapat ditemui dalam bentuk double deduction, investment allowances, dan loss carry forwards. Jenis insentif yang ketiga adalah berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Contohnya pengurangan tarif corporate income tax atau tarif withholding tax. Jenis insentif yang terakhir adalah penangguhan pajak. Jenis ini, diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu. Sedangkan selama pandemi ini, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu corporate income tax (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

Pemberian ini diberikan di tengah wabah corona yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia. Tujuannya dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari aspek Pajak dan UMKM sebagai dasar penilaian kemajuan UMKM agar tetap produktif dimasa Pandemi Covid-19.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada beberapa UMKM di Kota Trenggalek.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Trenggalek Namun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi, hal ini dikarenakan bentuk penelitian adalah survei dengan analisa deskriptif kualitatif.

Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan observasi, survai, literatur kepustakaan.

Analisis Data

Dalam melakukan kajian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi melalui buku-buku yang relevan melalui survei dan observasi terhadap UMKM kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi sehingga tergambar hasilnya baik bagi keberlangsungan UMKM walaupun dimasa Pandemi Covid-19.

PEMBAHASAN

Bidang Usaha UMKM

UMKM merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia. UMKM sendiri terdiri dari tiga jenis usaha, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Perbedaan ketiganya terletak pada jumlah aset dan omzet yang dihasilkan. 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif dengan aset kurang dari 50 juta rupiah dengan omzet maksimal 300 juta rupiah.

2. Usaha Kecil adalah usaha produktif dengan aset 50-500 juta rupiah dan omzet 300 juta sampai 2,5 milyar rupiah.

3. Usaha Menengah adalah usaha produktif dengan aset 500 juta hingga 10 milyar rupiah dan omzet 2,5-50 milyar rupiah.

Usaha yang bisa didirikan antara lain, Fashion, Kuliner, Fotografi, MUA, Perlengkapan bayi, Laundry dan Kosmetik. Usaha di bidang pakaian (fashion) sepertinya masih menjadi primadona di Indonesia, terutama yang dilakukan secara

online. Karena melalui usaha ini kita bisa menjual merek terkenal bahkan bisa pula membuat fashion kita dengan label atau merek sendiri.

Skin Care dan Kosmetik, pasar yang ditargetkan pun sekarang menjadi lebih luas, tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki kini juga menjadi pasar potensial untuk industri kosmetik dan skin care. Selain itu, tren untuk menggunakan bahan alami juga sedang populer dikalangan konsumen kosmetik Indonesia. Pastikan juga untuk mempertimbangkan laki-laki sebagai target pasar dan menggunakan bahan alami. Menurut lembaga riset Sigma Research Indonesia, menjadi reseller produk-produk bayi seperti botol susu, pakaian bayi, mainan bayi, hingga perlengkapan mandi bayi. Selanjutnya MUA (Make Up Artist) semakin populer karena semakin banyak perempuan yang ingin tampil lebih cantik dengan make up profesional. Jika suatu saat sudah mahir seorang wirausaha bisa membuat kelas atau kursus make up dan dapat memanfaatkan keahlian merias atau make up seperti wisuda, lamaran, pernikahan, photoshoot, dan acara-acara lainnya. Kuliner usaha kuliner memang selalu menjadi target pencarian didunia maya dan tidak pernah mati. Karena melalui photo berbagai makanan maupun minuman membuat konsumen tertarik untuk mencoba. Di Indonesia sendiri, bisnis kuliner menyumbang 41.40% produk domestik bruto ekonomi kreatif Indonesia dengan nilai 383 triliun rupiah. Melalui adanya layanan antar makanan seperti Go Food dan Grab Food, bisnis kuliner semakin berjaya di ranah online. Jasa antar makanan ini memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan secara online dan makanan akan diantar ke lokasi pemesan. Dengan memanfaatkan layanan antar makanan online, Anda memudahkan mereka yang sibuk atau tidak bisa pergi langsung ke toko. Go Food sendiri sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 ribu partner yang 80 persen di antaranya adalah usaha kecil menengah.

Pengetahuan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak dimasa pandemi COVID-19.

Teknis Keringanan Pajak UMKM dimasa Pandemi

Saat pandemi semua gerak menjadi terbatas, banyak UMKM yang mengalami penurunan omzet penjualan, karena semua kegiatan bukan hanya pada UMKM saja, namun disemua lini usaha harus mentaati Standar Operasional Prosedur (SOP) Covid-19.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Penerapan Insentif Pajak dimasa Pandemi COVID-19

Berdasarkan berbagai pengujian yang dilakukan peneliti lalu dilakukan sebuah analisis maka akan memberikan sebuah informasi secara objektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK N0.44 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak dimasa pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang berpengaruh secara signifikan.

Lalu, analisis jawaban kuesioner yang menyatakan setuju bahwa wajib pajak yang telah mengerti tujuan pemberian insentif, mengetahui prosedur pengajuan insentif pajak hingga mengerti bagaimana cara pelaporan insentif pajak dimasa pandemi, dalam hal ini akan membentuk sebuah persepsi bahwa pemberian insentif pajak ini diberikan pemerintah dengan tujuan meringankan beban pajak terutang dimasa pandemi dengan tujuan wajib pajak UMKM tetap bisa survive dimasa pandemi, sehingga dengan adanya persepsi positif akan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan terlebih dalam mematuhi segala bentuk aturan pemerintah dalam insentif pajak.

Jika dilihat dari karakteristik responden pada penelitian ini sebagian besar adalah usia produktif, lalu usaha yang telah berdiri lama mayoritas diatas lima tahun. Sehingga secara latar belakang juga membuat wajib pajak untuk memiliki persepsi yang positif tentang penerapan PMK No.44 atau pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah dimasa pandemi sehingga dapat mempengaruhi kepatuhannya.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Penerapan Insentif Pajak dimasa Pandemi COVID-19

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dari masing-masing pengujian dalam penelitian ini terdapat beberapa dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak dimasa pandemi COVID-19, hal ini dibuktikan dari hasil uji statistik t pada variabel pengetahuan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan.

Dari beberapa responden yang didapatkan peneliti, dapat menandakan bahwa responden tersebut memang benar-benar telah memahami prosedur dalam pemberian insentif, cara pengajuan untuk mendapatkan insentif, tujuan pemberian insentif dan bagaimana pelaporan pajak setelah mendapatkan insentif sehingga dengan adanya hal itu turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Penerapan Insentif Pajak dimasa Pandemi COVID-19

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dari masing-masing pengujian dalam penelitian ini terdapat beberapa dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak dimasa pandemi COVID-19.

Pada variabel ini, rata-rata jawaban kuesioner yang ditunjukkan untuk responden yaitu sangat setuju atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dalam memahami prosedur tentang insentif pajak, fungsi dari insentif pajak dan tujuan pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah dimasa pandemi COVID-19. Dari beberapa responden yang didapatkan peneliti, dapat menandakan bahwa responden tersebut memang benar-benar telah memahami prosedur dalam pemberian insentif, cara pengajuan untuk mendapatkan insentif, tujuan pemberian insentif dan bagaimana pelaporan pajak setelah mendapatkan

insentif sehingga dengan adanya hal itu turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Penerapan Insentif Pajak dimasa Pandemi COVID-19

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak dimasa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil analisis yang menyatakan bahwa responden merasa sangat setuju dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk mendapatkan informasi terkait insentif pajak karena dengan adanya sosialisasi pajak oleh petugas pajak, maka akan meningkatkan pemahaman mereka mengenai pengetahuan terbaru pajak yaitu insentif pajak yang diberikan saat pandemi. Sehingga wajib pajak merasa ada dukungan untuk menjalankan kewajibannya yang secara langsung akan mempengaruhi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak pula.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini, yaitu : Variabel persepsi wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak dimasa pandemi COVID-19. Kesimpulan tersebut memberikan hubungan bahwa dengan adanya persepsi wajib pajak dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi terciptanya kelancaran kebijakan baru ini ditengah-tengah pandemi, karena wajib pajak yang memiliki persepsi positif maka hal tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesimpulan tersebut memberikan hubungan bahwa pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang insentif pajak akan dapat mendorong perbuatan wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan, dan hal ini akan dapat membantu pemerintah dalam kelancaran program insentif pajak UMKM dimasa pandemi

karena program insentif ini diberikan pemerintah guna menstabilkan perekonomian ditengah-tengah pandemi COVID-19.

Besarnya peran dan efektifitas pemberdayaan yang telah diberikan oleh UMKM untuk perekonomian perlu tetap diupayakan, karena struktur UMKM kita masih didominasi Usaha Mikro. Banyak usaha kecil menengah yang dapat Anda bangun dan terapkan. Sebelum memulai usaha hendaknya Anda harus bisa memahami potensi apa yang Anda miliki dan apa yang benar-benar dibutuhkan disekitar Anda. Manfaatkan peluang usaha yang ada untuk menambah penghasilan, terlebih lagi dimasa Pandemi Covid-19 karena kita tidak akan pernah mengetahui kapan akan berakhir.

Melalui revolusi digital, pemilik UMKM juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan biaya terjangkau. UMKM berpotensi besar pula pada jumlah penerimaan pajak dari berbagai sektor usaha. Jumlah UMKM yang setiap tahunnya semakin banyak, memberikan peluang kepada pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Pemerintah memberikan keringan bagi UMKM dalam hal pajak atau insentif. Sehingga roda perekonomian tidak benar-benar berhenti dan negara pun terbantu

Saran

Ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, yakni :

1. Sebaiknya, dalam proses penelitian lebih diperbanyak lagi ragam jenis usaha dan didapat diberbagai wilayah kecamatan sehingga data yang didapatkan lebih beragam.

2. Sebelum melakukan penelitian, sebaiknya peneliti mencari informasi lebih tentang data diri responden yang sesuai dengan kriteria penelitian, agar memudahkan dalam menganalisis penelitian.

Daftar Pustaka

- Dewi, S., & Nataherwin, W. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124. www.pajak.go.id
- Listiyowati, Iin Indarti, Freddy Aldo Setiawan, F. W. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Http://Lppm-Unissula.Com/Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Jai/Article/View/13234*, 10(1), 6.
- Sinaga, R., & Purba, M. R. (2020). Pengaruh Pandemi Virus Corona (COVID-19) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur Dan Buah di Pasar Tradisional “ Pajak Pagi Pasar V ” Padang. *Regionomic*, 2(02), 37–48.
- Anggriani, I. V., Triandani, S., & Ardiani, F. (2020). *KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK DIMASA PANDEMI COVID-19 BAGI WAJIB PAJAK KHUSUS UMKM*. 1(2), 137–152.

Sandra, A., Indri Arfianti, R., Apriwenni, P., & Hanif. (2020). Pandemi Covid 19: Pelatihan Pajak bagi UMKM. *ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*, 2(2), 117–128. <http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/AIA/article/view/1299>

Rachmad Gesah Mukti Prabowo, SE. Ak, M. (2014). *Analisis Pemenuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Penerimaan Sektor Pajak*. 1(1), 103–120.